BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjadi arena bagi negara-negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dan memiliki dampak langsung terhadap terbentuknya pola interaksi tertentu. Salah satunya kita melihat globalisasi secara tidak langsung mendefinisikan negara-negara yang berhasil memanfaatkan globalisasi juga negara yang mendapatkan dampak negatif dari globalisasi. Pada dasarnya globalisasi adalah mengenai siapa yang punya kekuasaan atas ekonomi global dan kepentingan siapa yang mewarnainya. Semua tentang politik dan *power* seperti permasalahan rezim mata uang, standar keuangan, dan pondasi dari sistem keuangan global (Birdsall, 2003:2).

Globalisasi sangat erat kaitannya dengan isu pengurangan kemiskinan global. Isu pengurangan kemiskinan global ini telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan internasional (Winarno, 2014 :44). Isu mengurangi kemiskinan global ini muncul setelah banyaknya negara yang merdeka paska perang dunia. Negara-negara berkembang ini masih membutuhkan dana bantuan dan pinjaman untuk menstimulasi pertumbuhan ekonominya sehingga mampu mandiri dalam menjalankan perekonomian yang sehat dan berkembang.

Pengurangan kemiskinan global ini menjadi salah satu isu yang berpengaruh dalam sistem keuangan internasional saat ini. Terdapat dua institusi keuangan global yang mendominasi sistem keuangan internasional yaitu *International*

Monetary Fund (IMF) dan *World Bank*. Mekanismenya ialah IMF bertugas dalam manajemen krisis dan *World Bank* berperan sebagai bank pembangunan multilateral dengan salah satu tugas utamanya dalam bantuan pembangunan.

Awalnya, sistem keuangan internasional muncul dari globalisasi keuangan. Globalisasi keuangan terjadi dan semakin meningkat dengan munculnya perdagangan bebas pada abad ke 19. Era perdagangan bebas di abad ke 19 dimulai dengan perjanjian pasar bebas antara Perancis dan Inggris pada tahun 1860. Hal ini menyebabkan hubungan antar negara mulai terintegrasi khususnya masalah keuangan ditandai dengan meningkatnya arus keuangan yang mengalir antar perbatasan (Helleiner, 2008:215). Arus keuangan ini difasilitasi oleh sistem keuangan internasional yang saling terintegrasi dengan satu standar yang sama yaitu standar emas sehingga standarnya tetap (*fixed exchange rates)*. Dengan adanya globalisasi keuangan memunculkan pusat-pusat keuangan dunia yang mengatur investasi-investasi antar negara. Pusat keuangan dunia ini berbasiskan negara-negara yang berhasil menjadi negara terbesar surplus perdagangannya seperti Inggris disusul Amerika Serikat paska perang dunia satu.

Perang dunia pertama menjadi awal bagaimana hubungan antar negara yang terintegrasi akibat perdagangan bebas mulai merenggang. Standar emas kemudian diabaikan, standar kurs mata uang kemudian diambangkan (*floating exchange rates*). Standar emas kemudian dipakai kembali setelah perang dunia pertama berakhir dan tidak bertahan lama setelah munculnya depresi besar akibat krisis keuangan internasional pada tahun 1930. Hal ini diperburuk dengan absennya institusi *lender of last resort* setelah Inggris tidak lagi menjadi pusat keuangan

dunia dan Amerika Serikat yang menggantikannya masih memiliki sentimen isolasionis dan konflik orientasi antara orientasi internasional dan orientasi domestik (Helleiner, 2008:217).

Munculnya IMF dan *World Bank* menjadi paradigma baru dalam sistem keuangan internasional karena sistem keuangan internasional sebelum adanya IMF dan *World Bank* merupakan sistem dengan tidak adanya institusi antar negara yang mengatur jalannya keuangan internasional. Dua institusi ini dibentuk pada bulan July 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat sehingga seringkali disebut lembaga Bretton Woods. Konferensi ini dihadiri oleh 44 negara yang didasari oleh keinginan untuk membentuk tatanan keuangan global untuk menghindari Depresi Besar terjadi lagi seperti yang terjadi tahun 1930 (https://www.imf.org/external/about/histcoop.htm diakses pada tanggal 8 April 2016). Pendirian dua institusi ini juga mengawali isu pinjaman pembangunan internasional terhadap negara-negara miskin. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus dari lembaga Bretton Woods yaitu pengurangan kemiskinan.

Dua institusi keuangan global ini terkenal dengan sistem yang digunakannya merujuk pada *Washington Consensus. Washington Consensus* mulanya adalah paket kebijakan, berupa kesepakatan antara politisi Kongres, badan pemerintah, dan bank sentral AS, serta lembaga keuangan internasional mengenai cara pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang. John Williamson (1990) merumuskan *Washington Consensus* ke dalam 10 butir yaitu:

1. Disiplin kebijakan fiskal

2. Pengalihan belanja subsidi, kecuali susidi langsung, pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
3. Reformasi pajak - memperluas basis pajak dan penurunan tingkat pajak
4. Suku bunga yang ditentukan pasar dan positif secara riil
5. Nilai tukar kompetitif
6. Liberalisasi perdagangan, terutama penghapusan lisensi dan penerapan tarif tunggal
7. Liberalisasi investasi langsung asing
8. Privatisasi BUMN
9. Deregulasi - penghapusan regulasi yang menghambat persaingan, kecuali untuk menjaga keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan.
10. Perlindungan hak milik.

Washington Consensus ini sering disebut juga kebijakan neoliberal. Pada pelaksanaannya ditandai dengan beberapa kegagalan dalam membangun perekonomian negara berkembang. Hal ini terkait bagaimana negara-negara berkembang dituntut mengikuti sistem pembangunan negara maju sebagai syarat menerima pinjaman. Sistem seperti ini nyatanya tidak banyak memberikan pembangunan ke arah yang positif. Pollin menuliskan bahwa era 1961-1980, laju pertumbuhan GDP per kapita rata-rata negara mencapai 3,2 % per tahun. Namun, ketika dunia dilanda proyek neoliberal pada era tahun 1981-1999, angka pertumbuhan itu hanya 0,7% per tahun (Winarno, 2014:47).

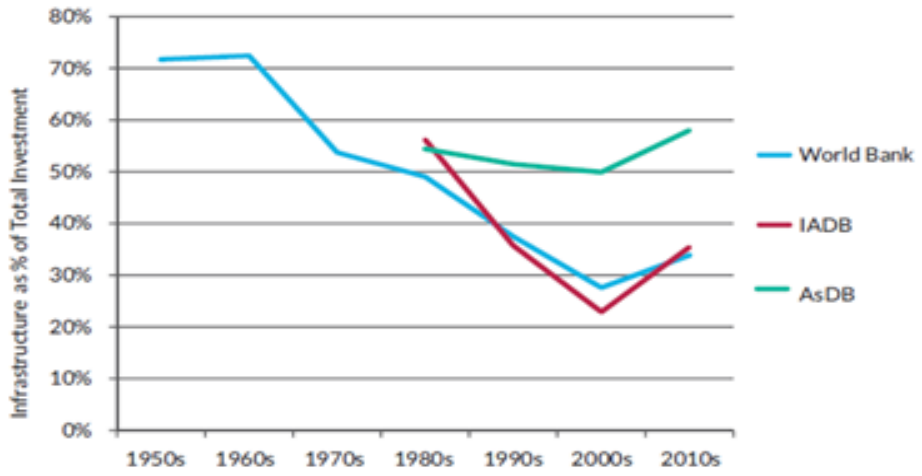
World Bank telah meminjamkan lebih dari 356 milliar dolar terhadap negara-negara khususnya *Less Developed Countries* (LDCs). Tapi kebanyakan penerima pinjaman tidak lebih baik daripada sebelum menerima pinjaman, faktanya kebanyakan peminjam keadaannya malah menjadi lebih buruk. Dari 66 LDCs, 37 di antaranya tidak menjadi lebih baik ketimbang sebelum menerima pinjaman. Dari 37 negara, 20 di antaranya malah menjadi lebih buruk ekonominya. Selain itu, dari 20 negara, 8 negara ekonominya menurun drastis lebih dari 20 persen semenjak menerima pinjaman dari *World Bank* (http://www.heritage.org/ diakses pada 23 April 2016).

Komisi Meltzer mengungkapkan laju kegagalan proyek dari *World Bank* melebihi 50 persen di Afrika sampai tahun 2000 (Lavagnon, 2012:105). Young Hoon Kwak, Assistant Professor dari *The George Washington University* melihat banyak faktor pada kegagalan pinjaman di antaranya faktor-faktor internal pemberi pinjaman seperti budaya, politik, fisik negara, korupsi, dan lain-lain. Kwak kemudian memberikan rekomendasi untuk fleksibilitas dari pemberi pinjaman karena faktor-faktor kegagalan sendiri akibat penyamarataan negara berkembang dan negara maju dari segi faktor-faktor yang disebutkan (http://home.gwu.edu/ di akses pada tanggal 23 April 2016).

Fokus *World Bank* dalam industri ekstraktif dengan investasi asing langsung ternyata membahayakan lingkungan dan tidak berkelanjutan. Hal ini dikritik tidak mengurangi kemiskinan global. Ketergantungan terhadap industri tidak terbaharui seperti minyak, gas berpengaruh secara negatif pada pembangunan ekonomi, politik, dan sosial suatu negara khususnya di Afrika. Scott Pegg dari Indiana

University Purdue University Indianapolis pada 2003 meneliti bahwa konsep mengurangi kemiskinan global dalam kasus *World Bank* telah berubah menjadi pemiskinan global atau memiskinkan dengan kesengajaan.

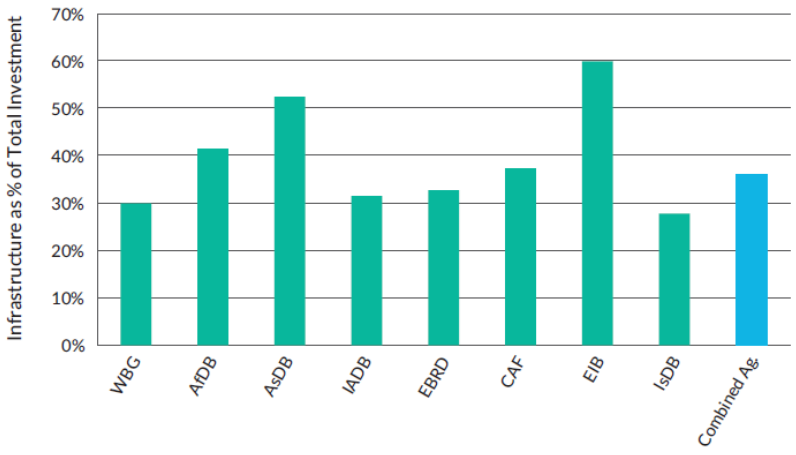
Fokus terhadap ekstraktif tidak dibarengi dengan kebutuhan infrastruktur. *World Bank* sebagai bank pembangunan multilateral hanya meletakkan fokus infrastruktur dalam investasinya pada angka di bawah 45 %.



Source : Infrastructure Financing in the Developing World, Humprey 2015
Note: AsDB: Asian Development Bank
IADB: Inter-American Development Bank

Gambar 1.1 Fokus Bank Pembangunan Multilateral pada Infrastruktur I

Begitu juga dengan Bank Pembangunan Multilateral lainnya, Hanya Asian Development Bank dan European Investment Bank yang sanggup menfokuskan pada pembangunan infrastruktur melebihi 50 %. Setelah dikombinasikan pun, Fokus infrastruktur oleh setiap Bank tidak melebihi 40 %.



Source : Infrastructure Financing in the Developing World, Humprey 2015

Gambar 1.2 Fokus Bank Pembangunan Multilateral pada Infrastruktur II

Padahal penelitian *Mckinsey Global Institute* yang melaporkan investasi global untuk infrastruktur sebesar 57 trilliun dolar AS akan sangat dibutuhkan hingga tahun 2030. Diperhitungkan, dibutuhkan per tahun 3,2 trilliun dolar untuk investasi. Dibutuhkan 1 trilliun dolar per tahun yang diprediksi belum bisa terpenuhi Bank Multilateral yang ada (http://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/ money-isnt-everything-but-we-need-$57-trillion-for -infrastructure diakses pada tanggal 27 April 2016).

Kemiskinan global juga berkaitan dengan krisis global yang terjadi beberapa kali setelah sistem Bretton Woods didirikan hingga saat ini. Krisis yang terjadi di antaranya yang paling parah ialah pada krisis tahun 1997 yang jatuh pada negara-negara asia dan tahun 2008 yang jatuh pada negara-negara Atlantik utara yang diawali dari Amerika Serikat.

Sejak 1971, rezim keuangan global ialah kurs mata uang mengambang atau *flexible exchange rates* dengan dominasi uang dolar Amerika Serikat. Ini membuat rezim keuangan begitu tidak stabil. Banyak pandangan yang melihat bahwa ini membuat AS dengan mudah mengadopsi kebijakan yang membuat arus modal berpindah tanpa bisa diprediksi dan diatur (Wolf, 2014:25). Contohnya, sebelum terjadi Krisis 1997, kebijakan-kebijakan dalam *Federal Reserve* atau *The Fed*, Bank Sentral Amerika Serikat begitu berpengaruh terhadap investasi-investasi dalam negara berkembang. Kenaikan suku bunga *The Fed* pada tahun 1990-an memicu jatuhnya mata uang Asia dan kebangkrutan Russia (http://www.beritasatu.com/ diakses pada tanggal 23 April 2016). Kenaikan suku bunga ini menjadikan para spekulan menarik modal secara tidak terprediksi dari negara-negara asia, sehingga terjadi defisit yang kemudian menjatuhkan nilai mata uangnya. Tentunya hal ini menambah rentetan panjang kemiskinan global baru.

IMF berperan dalam membantu stabilitas dalam ekonomi internasional sebagai misinya. Namun, menurut Josep Stiglitz IMF telah gagal dalam misi dengan buruknya kebijakan ekonomi, buruknya kepemimpinan dan perumpamaan beliau mengenai *taxation without representation* (Cherenfant, 2014:49). Kebijakan yang buruk menurut Stiglitz, lebih kepada bagaimana IMF memberikan bantuan pinjaman hanya kepada negara yang setuju untuk mengimplementasikan kebijakan kontraktif – pemotongan belanja APBN, suku bunga tinggi- sebagai kondisi atas bantuan (Treisman, 2003:5). Selain itu, penekanan atas

memberlakukan pasar yang lebih terbuka sebagai kondisi utang menambah resiko atas negara-negara yang belum terbiasa dengan kompetisi pasar terbuka.

Buruknya kepemimpinan merujuk pada pemimpin nya yang selalu orang eropa tidak mewakili bangsa-bangsa keseluruhan (Cherenfant 2014:50). Setelah Strauss-Kahn mundur dari kursi *managing director* IMF karena terjerat kasus, penggantinya kembali dari Eropa yaitu Cristine Lagarde (http://www.theguardian.com/world/2012/may/25/ christine- lagarde- imf- euro diakses pada tanggal 30 April 2016). *Taxation without representation* merujuk pada bagaimana IMF sebagai intitusi publik didanai oleh "pajak" dari seluruh negara namun dominasi negara maju dalam voting membuat IMF dianggap hanya melayani kepentingan negara-negara maju saja (https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=33 diakses pada tanggal 30 April 2016).

Representasi pada proses pengambilan keputusan dilihat pada kontribusi kuota terhadap dana yang dimiliki IMF maupun *World Bank*. Kuota ini sesuai dengan artikel ke 3 *Article Of Agreement* dari IMF juga *Article of Agreement* dari institusi-institusi *World Bank* sepeti *International Bank Reconstruction and Development* dan lain-lain. Pada IMF perbandingan antara negara berkembang dan negara maju pada tahun 2008, bisa dilihat *quota shares* sangat tidak seimbang, dengan negara maju memegang *quota* sebesar kurang lebih 55.2 % dan negara berkembang hanya pada kisaran 44.8 %. Itu pun imbas dari reformasi kuota tahun 2010 yang mendapat *delay* selama tiga tahun karena kongres AS pada awalnya tidak menerima reformasi.

Veto AS dalam IMF mengisyaratkan pengaruh AS dalam lembaga keuangan internasional begitu besar dan menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak khususnya negara berkembang. Bukan tidak mungkin di lima tahun ke depan, AS menveto kembali reformasi kuota karena pada dasarnya secara perhitungan sampai saat ini AS sudah kehilangan veto absolutnya di IMF.

Maka dominasi negara-negara maju dalam proses pengambilan keputusan pada IMF maupun *World Bank* dinilai menjadi salah satu indikator penyebab tidak tepatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan IMF maupun *World Bank* khususnya dalam mengurangi kemiskinan global. Kurangnya representasi negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak tepat karena pada dasarnya negara berkembang lah yang menjadi objek penerima pinjaman dan negara berkembang lah yang lebih tahu bagaimana sistem dan fokus bidang pinjaman yang tepat dalam menghadapi kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Birdsall, pengurangan kemiskinan global sangat tergantung pada baiknya sistem *global economic governance* (Birdsall, 2003:1). Baiknya *global economic governance* yang dimaksud ialah seimbangnya representasi aktor-aktor yang ada dalam struktur ekonomi global. Aktor-aktor yang mewarnai sistem ekonomi global di definisikan menjadi dua kelompok yaitu negara industrial atau negara maju dan negara berkembang.

Dalam kesimpulannya, ia menjelaskan bagaimana negara berkembang lebih banyak terkena kerugian ketika krisis dan juga tertinggal perekonomiaannya ketika perekonomian dunia sedang membaik sehingga perlu adanya wakil negara

berkembang untuk ikut merumuskan kebijakan apa yang lebih tepat dalam menangani permasalahan keuangan negara-negara berkembang.

Isu dari sistem keuangan internasional ini mendorong grup *Brazil Russia India China South Africa* atau BRICS yang pada awalnya bernama BRIC (tanpa *South Africa*) mendirikan apa yang populer disebut BRICS Bank (http://in.reuters.com/article/emerging-brics-bank di akses tanggal 27 Februari 2016) BRICS Bank merujuk pada dua institusi lembaga keuangan internasional yang didirikan BRICS di Fortaleza Brazil pada 14-16 Juli 2014 yaitu *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) (Danns, 2015:128).

BRICS sendiri merupakan bentuk kerjasama multiltateral dari lima negara *Emerging Market Economies* (EMEs) yaitu Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Formalisasi nya muncul pada tahun 2009 yaitu dengan mengadakan KTT pertama pertama kalinya pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg, Russia (Singh, 2014: 7). Pada KTT ketiga di Sanya, China, BRICS mengumumkan Afrika Selatan sebagai salah satu anggota terbaru.

Munculnya negara *Emerging Market Economies* merupakan salah satu dinamika dari hubungan internasional di awal abad ke 21. *Emerging Market Economies* (EMEs) ialah pasar dari negara berkembang dengan tingkat ekspektasi pertumbuhan ekonomi tinggi. Ashoka Modi (Modi, 2004: 4) menyatakan karakterisasi dari negara-negara EMEs ialah salah satunya ialah pada ciri penting dari pasar negara berkembang yang *volatile* dan karakter transisi dari mereka terjadi dalam dimensi ekonomi, politik, sosial dan demografis. Munculnya

negara-negara EMEs sekaligus menggeser kekuatan ekonomi global dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang.

Term dari BRICS muncul di tahun 2001 ketika Jim Oneill menulis paper mengenai *Building Better Global Economic BRIC*. Oneill berargumen bahwa beberapa EMEs yaitu Brazil, India, China dan Russia memiliki prospek dalam menggantikan kekuatan ekonomi global yang saat itu dikuasai oleh negara-negara *Group of Seven* atau G7. Pertumbuhan GDP dari ekonomi pasar negara-negara BRIC mampu melampaui beberapa negara G7 pada tahun 2001-2002 (O'Neill, 2001:1).

Beberapa negara BRICS berperan penting ketika krisis global terjadi. Brazil dan China berperan penting dalam kolaborasinya dengan G-20 termasuk dalam pengalokasian 1.1 triliun dolar *global recovery plan* dan meningkatkan dana di IMF (Haibin, 2012:6). Dilihat dari ketahanan ekonomi dari empat negara BRIC. Sekalipun terkena dampak, tetapi hanya Russia yang terpukul pertumbuhan ekonominya hingga minus 7,8 %, yang lainnya pada kisaran minus 1-2 %. Bahkan China dan India masih tetap pada kisaran 8,7% dan 5,7 % (the BRICS Report, 2012:105). BRICS memperlihatkan kemampuan bertahan dalam konteks turbulensi ekonomi (Abdenur, 2013: 79). Hal ini menimbulkan pandangan bahwa negara-negara berkembang mampu ikut berkontribusi lebih jauh dalam sistem keuangan internasional dan berperan vital khususnya bagi keseimbangan keuangan internasional.

Dalam melihat sistem keuangan internasional, BRICS pada KTT pertama di Yekaterinburg, Russia, menyetujui sebuah konsensus bahwa ada kebutuhan akan

sistem keuangan yang stabil, bisa diprediksi dan lebih beragam. (http://brics5.co.za/ diakses pada tanggal 20 maret 2016). Hal ini kemudian direalisasikan oleh BRICS dengan salah satu langkahnya yaitu membentuk *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement.*

Pembentukan *New Development Bank* diawali dasarnya pada KTT keempat BRICS tahun 2012. Dalam deklarasinya, tertera bahwa maksud BRICS membentuk *New Development Bank* adalah untuk menghimpun dana untuk infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dalam proyek di BRICS dan negara berkembang lainnya (http://brics5.co.za/about-brics/summit-declaration/fourth-summit/ diakses pada tanggal 23 April 2016). *New Development Bank* kemudian disetujui dalam bentuk *Agreement* pada KTT keenam BRICS di Fortaleza, Brazil.

Sementara itu, *Contingent Reserve Arrangement* ditandatangani dalam bentuk traktat pada KTT keenam Brazil. Tujuannya memperkuat dan membangun kerjasama antar anggota negara BRICS http://www.cbr.ru/eng/press/pr.aspx?file=04092015_185039eng2015-09-04T18_46_05.htm diakses pada tanggal 27 April 2016). Volume dana keseluruhan dari *Contingent Reserve Arrangement* ialah 100 milliar US Dolar dengan 41 miliar dari China, 18 milliar dari Brazil, Russia, dan India, dan Afrika Selatan berkontribusi 5 milliar (http://en.brics2015.ru/news/ diakses pada tanggal 27 April 2016).

New Development Bank maupun *Contingent Reserve Arrangement* merupakan sistem tersendiri yang ditawarkan BRICS dalam sistem keuangan internasional. *New Development Bank* berfungsi memobilisasi sumber daya modal pada proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dalam BRICS dan

negara berkembang lainnya, melengkapi upaya-upaya lembaga keuangan internasional multilateral dan regional lainnya untuk pertumbuhan dan pembangunan global (http://ndbbrics.org/ di akses pada 27 April 2016). Sedangkan *Contingent Reserve Arrangement* sesuai dengan artikel pertama pada *Treaty of Contingent Reserve Arrangement* ialah sebagai mekanisme dukungan likuiditas dan instrumen pencegahan sebagai respon terhadap tekanan *Balance of Payment* yang terjadi atau akan terjadi pada negara-negara BRICS (http://www.brics.utoronto.ca/docs/140715-treaty.html diakses pada 24 April 2016).

Pada perkembangannya, *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement* ini aktif semenjak tahun 2015 setelah diluncurkan pada KTT ke tujuh BRICS di Ufa, Russia. Sejauh ini *New Development Bank* telah menerima proposal pinjaman pertamanya pada tanggal 16 April 2016 pada infrastruktur proyek pembaruan energi. *New Development Bank* menerima proposal Brazil sebesar 300 juta dolar, China 81 juta dolar, India 250 juta dolar dan Afrika Selatan 180 juta dolar. (https://www.rt.com/business/339797-ndb-first-project-loans/ diakses pada tanggal 27 April 2016).

Kemunculan *New Development Bank* maupun *Contingent Reserve Arrangement* dinilai memiliki kontribusi terhadap sistem keuangan internasional khususnya menjadi alternatif mekanisme baru di samping mekanisme-mekanisme yang sudah ada, khususnya dominasi mekanisme *Washington Consensus* dengan selalu menyertakan syarat-syarat politik khususnya perubahan ke arah liberalisasi dan privatisasi. Hal ini dijelaskan Paulo Noguiera Batista selaku wakil presiden

dari *New Development Bank.* Ia menyoroti pinjaman *New Development Bank* akan senetral mungkin, efisien dan fleksibel. Setiap modalitas pinjaman akan berbeda syarat sesuai dengan spesifikasi proyek dan preferensi dari peminjam. Persetujuan pemerintah akan disertakan jika perlu sebagai tindak lanjut dari prosedur (http://www.thehindubusinessline.com/ money-and-banking/ brics-bank-to -issue-first-yuan-denominated-bonds/article8676906.ece diakses pada tanggal 12 Juni 2016).

Fleksibilitas *New Development Banks* terjadi karena perbedaan sistem yang lebih *open mindset*. Setiap negara BRICS sama-sama merupakan negara yang berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih mengetahui bagaimana situasi negara berkembang yang menjadi partner penerima pinjaman. Kemampuan untuk membentuk penawaran dan proses menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini ditekankan oleh KV Kamath, presiden dari *New Development Bank* yang diundang pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank sentral G20 pada Februari 2016. Dia menyatakan *New Development Bank* akan bekerja dengan acuan kecepatan dan mengurangi siklus penerimaan proyek yang berkepanjangan. *New Development Bank* didesain dengan fleksibilitas yang menciptakan sistem pinjaman yang inovatif dalam pendanaan maupun dalam peminjaman (http://ndb.int/intervention-by-the-president-at-the-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting.php diakses pada tanggal 13 Juni 2016). Kecepatan proses ini diproyeksikan selama enam bulan, jauh dari proses-proses yang terjadi di Bank Multilateral lain yang karena berbagai alasan

mencapai dua tahun (http://ndb.int/brics-bank-is-coming-of-age-of-developing-countries-kv-kamath.php diakses pada tanggal 13 Juni 2016).

Fleksibilitas dan inovasi ini mirip dengan konsep *Beijing Consensus*. Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Joshua Cooper Ramo dalam melihat bagaimana model pembangunan ekonomi China sebagai alternatif untuk negara-negara berkembang (http://www.salon.com/ tech/htww/ 2006/ 09/15/beijing_consensus/ diakses pada tanggal 12 Juni 2016). Konsep ini awalnya memperhatikan bagaimana China mampu membangun ekonominya dengan tetap pada sistem politik otoriter. Hal ini berarti China membangun ekonomi nasional dengan jalan pilihan sendiri tanpa didikte secara keseluruhan oleh konsep neoliberal atau *Washington Consensus*. Namun hal yang paling disoroti ialah kelanjutan *Beijing Consensus* dengan interaksi bantuan pinjaman China untuk pembangunan ekonomi negara-negara Afrika dengan prinsip *no-string-attached gift and loans*. Pinjaman yang diberikan China terbebas dari persyaratan politik merupakan bentuk fleksibilitas. Salah satunya, China memberikan pinjaman ke Ethiopia senilai 100 juta dolar untuk proyek penyaluran air tanpa melihat sistem politik dari Ethiopia. (http://af.reuters.com/ article/ topNews/ idAFJOE7AG00820111117 diakses pada tanggal 13 Juni 2016).

Selain pada aspek fleksibilitas dan efisiensi, pada bagian IV artikel 24, lembar persetujuan *New Development Bank*, kurs mata uang juga boleh disediakan dalam kurs lokal dimana proyek pinjaman dilakukan asalkan disediakan kebijakan yang tepat untuk menghindari kurs *mismatch* secara signifikan. Hal in

menghindari penggunaan kurs mata uang dolar yang terbukti kurang stabil akibat kebijakan-kebijakan *The Fed.*

Keinginan BRICS untuk berkontribusi secara eksplisit tercatat dalam lembar persetujuan *New Development Bank* sebagai latar belakang dari persetujuan BRICS mendirikan *New Development Bank.* Salah satu latar belakang dari pendirian *New Development Bank* ialah untuk berkontribusi dalam sistem keuangan internasional yang cocok dengan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menghormati aspek lingkungan. Maka dari itu penggunaan dana dari *New Development Bank* difokuskan pada infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi dan sosial khususnya dalam aspek negara berkembang (http://ndb.int/our-purpose.php diakses pada tanggal 13 Juni 2016). Ketika Bank multilateral lain tidak mampu menfokuskan keseluruhan dana nya untuk infrastruktur karena resiko yang dihadapi, *New Development Bank* menjadikannya sebagai salah satu fokus utama. Dalam menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan Infrastruktur, *New Development Bank* berpartner dengan seluruh bank Multilateral khususnya *Asian Investment Infrastructure Bank* (http://www.zerohedge.com/news/2015-07-25/brics-bank-aiib-pledge-partnership-loans-be-issued-yuan diakses pada tanggal 13 Juni 2016). Bank ini didirikan China dan merupakan bank regional yang mengkhususkan investasi pada infrastruktur.

Pembangunan-pembangunan yang didasarkan pada pinjaman-pinjaman dari bank multilateral yang tidak melihat aspek keberlanjutan mendorong BRICS

dengan NDB menfokuskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Penyaluran dana terhadap isu ini diharapkan menjadikan *New Development Bank* sebagai partner dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa diartikan sebagai kontribusi BRICS dalam melihat perubahan arah pembangunan (http://ndb.int/our-purpose.php diakses pada tanggal 13 juni 2016).

Contingent Reserve Arrangement dibentuk sebagai alternative baru bagi negara BRICS jika kesulitan *balance of payments* sehingga tidak menimbulkan krisis. Hampir sama dengan *New Development Bank, Contingent Reserve Arrangement* menyalurkan dananya tanpa adanya syarat-syarat politik yang disisipkan seperti pengurangan subsidi atau reformasi ekonomi layaknya *Washington Consensus* (He, 2016:4). *Contingent Reserve Arrangement* mempertimbangkan kondisi finansial dari negara yang membutuhkan bantuan dengan jangka watu pendek.

Ada aspek penting yang disoroti dalam kontribusi BRICS melalui *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement* dalam sistem keuangan internasional yaitu kerjasama selatan-selatan. (https://www.devex.com/ news/what-is-new-about-the-brics-led-newdevelopment-bank-88126 diakses pada tanggal 2 juni 2016). Kerjasama selatan-selatan merupakan prospek kerjasama antar negara berkembang yang disimbolkan dengan konsep selatan. Kerjasama selatan-selatan diartikan dalam *new international economic order* pada tahun 1974 yaitu kemandirian kolektif dan kerja sama yang berkembang di antara negara-negara berkembang akan lebih memperkuat peran mereka dalam tata ekonomi internasional yang baru (http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-

isuue/170-april-2012/1379-grand-design-baru-kerja-sama-selatan-selatan.html diakses pada 2 juni 2016).

Pembentukan bank pembangunan seperti *New Development Bank* oleh negara-negara selatan bisa dilihat sebagai salah satu aspek kemandirian dalam pembangunan global dan pengurangan kemiskinan. Kemandirian ini dicerminkan dengan munculnya alternative baru dalam mekanisme sistem keuangan internasional di samping sistem yang telah ada sebelumnya dan cocok bagi pembangunan negara berkembang.

New Development Bank dan *Contingent Reserve Arrangement* juga dipandang melengkapi konsensus mengenai sistem keuangan internasional yang diinginkan BRICS seperti diutarakan pada KTT pertama BRICS di Yekaterinburg yaitu, stabil dan prediktif dengan adanya kemudahan dalam penggunaan kurs mata uang sendiri juga beragam dengan sistem pinjaman berbeda dengan fleksibilitas dari kondisi pinjaman.

Beberapa peneliti telah membahas tema BRICS khususnya dalam lingkup sistem keuangan internasional. Penelitian pertama ialah jurnal yang dibuat oleh Ade Priangani dari Universitas Pasundan berjudul Perkembangan BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa) dalam kancah ekonomi politik global yang ditulis pada tahun 2015 dalam Jurnal Kebangsaan. Beliau merupakan Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Dalam penelitiannya, beliau membahas fenomena BRICS secara umum dengan landasan teori dari tahap kapitalisme internasional. Adapun Persamaannya jurnal ini membahas fenomena BRICS. Perbedaan nya ialah jurnal ini mendeskripsikan

kemunculan BRICS dan bagaimana posisi BRICS dalam *global economic governance* sedangkan peneliti lebih membahas pada kontribusi BRICS melalui NDB dan CRA dalam sistem keuangan internasional.

Adapun penelitian lainnya ialah tesis dari Jonas Solstad Sønnesyn yang berjudul BRICS *and the New World order*. Sønnesyn merupakan Magister dari Norwegian University of Science and Technology. Inti dari tesis Sønnesyn ialah membahas mengapa BRICS belum menjadi sebuah aliansi kekuatan. Persamaannya ialah penelitian ini membahas secara luas bagaimana BRICS berkontribusi terhadap sistem keuangan internasional. Perbedaannya fokus kesimpulan, Sonnesyn menfokuskan dalam mencari alasan mengapa BRICS belum menjadi aliansi kekuatan.

Tesis dari Miller Cherenfant berjudul *The Feasibility of BRICS Financial System*. Miller Cherenfant merupakan mahasiswa *Honors Program* dari University of Florida. Tesis ini dibuat pada tahun 2014 dan membahas kemungkinan sistem keuangan BRICS. Persamaannya ialah pada tema penelitian pada sistem keuangan yang dipromosikan BRICS. Perbedaannya ialah fokus dari peneliti ialah pada kontribusi BRICS dalam rezim keuangan internasional dan informasi lebih update dengan *agreement* dari kedua institusi dengan Cherenfant lebih mengacu pada prospek dengan landasan NDB belum mencapai tahap *agreement.*

Atas permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Kontribusi *Brazil Russia India China South Africa* (BRICS) dalam Sistem Keuangan Internasional"**. Peneliti ingin mendeskripsikan kontribusi BRICS

dengan membentuk bank BRICS (NDB dan CRA). Kontribusi ini sejalan dengan pendirian alternatif baru selain institusi IMF maupun *World Bank* dalam sistem keuangan internasional.

Pembahasan Skripsi ini didukung oleh beberapa mata kuliah dari Hubungan Internasional.

1. Organisasi Internasional yang penulis ambil satu pembahasannya mengenai Rezim Internasional
2. Ekonomi Politik Internasional dengan mengambil salah satu bahasannya yaitu Sistem Keuangan Internasional
3. Studi Ekonomi Negara Berkembang karena penelitian ini berdasar pada isu reduksi dari kemiskinan global, dan keseimbangan negara berkembang dengan negara maju atau industrial dalam Sistem Keuangan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Mayor

Bagaimana kontribusi BRICS dalam sistem keuangan internasional?

1.2.2 Rumusan Minor

1. Mengapa BRICS mendirikan NDB dan CRA?
2. Bagaimana signifikansi dari pendirian NDB dan CRA oleh BRICS dalam Sistem Keuangan Internasional?

1.2.3 Pembatasan Masalah

BRICS muncul sebagai wakil negara-negara berkembang untuk menjadi agen dalam reformasi sistem keuangan internasional. Batasan masalah ialah kontribusi BRICS dalam sistem keuangan internasional dengan faktor yang dianalisis ialah bukti-bukti empiris yaitu pendirian NDB dan CRA. Batasan waktu ialah antara 2009 sebagai langkah formalisasi BRICS dengan melakukan KTT pertama di Yekaterinburg, Russia hingga pinjaman pertama dalam NDB yang dibuat oleh BRICS pada 16 April 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ialah mendeskripsikan kontribusi BRICS dalam sistem keuangan internasional.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah

1. Mendeskripsikan mengapa BRICS mendirikan NDB dan CRA
2. Menganalisa korelasi dari kontribusi BRICS dan sistem keuangan internasional sehingga tergambarkan masalah yang diteliti.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menganalisa BRICS sebagai dinamika baru dalam tatanan hubungan internasional khususnya dalam sistem keuangan internasional.

1. 4. 2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hubungan internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umum.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat juga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam tatanan dunia baru dengan kemunculan BRICS.